

**PENGELOLAAN TAMAN MARGASATWA DAN BUDAYA KINANTAN
KOTA BUKITTINGGI DALAM UPAYA MENUJU
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH**

Oleh :

Dwi Astuti Purnama Sari

(*e-mail: dwi_assizt@yahoo.com*)

Pembimbing : Dr. Febri Yuliani, S.Sos, M.Si

Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. H.R. Soebrantas Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru

28293 Telp/Fax. 0761-63277

Abstract

Management of the zoo is very important, considering zoo is an asset that must be preserved. The zoo should be managed independently, so it can be arranged well. Bukittinggi has the oldest zoo in Indonesia, it is Taman Margasatwa and Budaya Kinantan (TMSBK). Currently, TMSBK is managed by Development Culture and Tourism in Bukittinggi and has a status a Conservation Agency. According to TMSBK leader's target, TMSBK should have been Badan Layanan Umum Daerah, considering it has been eight years into a Conservation Agency. According to directly observation, the problem is the management of TMSBK is not optimal. The purpose of this research is to knowing how the management of Taman Margasatwa and Budaya Kinantan and to knowing obstacle factor in the management of Taman Margasatwa and Budaya Kinantan in effort towards Badan Layanan Umum Daerah.

The theory used is management by George R. Terry starting from planning, organizing, actuating and controlling. This research uses a qualitative descriptive method. In collecting the data researcher uses the method of observation, interview and documentation.

The result of this research gets conclusion that management by Departement Culture and Tourism in Bukittinggi is not optimal. There is still a shortage, especially in organizing and controlling by Departement Culture and Tourism in Bukittinggi. And then, obstacle factor in the management of Taman Margasatwa and Budaya Kinantan in effort towards Badan Layanan Umum Daerah, it is human resources, evaluation, permission from local leaders and visitors.

Keywords: Management, Badan Layanan Umum Daerah

PENDAHULUAN

Perencanaan pembangunan dan seluruh agenda pembangunan sebelumnya ditentukan oleh

Pemerintah. Namun seiring dengan gerakan reformasi yang bergulir di

Indonesia pada pertengahan tahun 1998, Pemerintah dituntut untuk

melakukan perombakan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang dulunya bersifat sentralistik menuju desentralisasi. Salah satu kebijakan yang kemudian diterapkan adalah dengan menerapkan sistem otonomi daerah dimana daerah diberikan pelimpahan kewenangan untuk mengurus, menata dan mengatur daerahnya dengan asumsi bahwa daerah lebih mengetahui atau memahami potensi, kebutuhan dan segala permasalahan yang ada di daerah yang bersangkutan serta dalam rangka percepatan pelayanan kepada masyarakat dan menyerap aspirasi masyarakat setempat.

Dengan berlakunya Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengenai pelimpahan wewenang Pemerintah kepada Pemerintah Daerah sebagai daerah otonom yang memberikan wewenang terhadap daerah. Hal ini dilakukan dengan memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada pemerintahan kabupaten/kota untuk dapat menyusun dan memanfaatkan sumber daya yang terdapat di wilayah administrasinya serta menyusun kebijakan dalam penerapannya termasuk dalam pengelolaan pembangunan kepariwisataan sebagai salah satu sektor pembangunan.

Pemerintah Kota Bukittinggi yang telah menerapkan kebijakan otonomi daerah mempunyai wewenang untuk mengelola seluruh potensi yang ada, seperti potensi wisata. Dari keseluruhan potensi wisata yang dimiliki Kota Bukittinggi, Taman Margasatwa dan Budaya Kinantan (TMSBK) menjadi salah satu wisata unggulan. Hal ini dapat dilihat dari jumlah pengunjung dan hasil penjualan karcis TMSBK yang meningkat dibandingkan

dengan potensi wisata lainnya. Tentunya hal ini dapat membuat kelestarian TMSBK terjaga dengan baik. Pelestarian yang baik sejalan dengan pengelolaan yang baik juga. Dalam hal pengelolaan yang berperan aktif dan bertanggung jawab adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bukittinggi.

Pengelolaan terhadap TMSBK dapat dilakukan melalui dua tahap, yaitu pengelolaan fisik dan non fisik. Pengelolaan fisik adalah pengelolaan terhadap fisik bangunan TMSBK. Sedangkan pengelolaan non fisik adalah pengelolaan yang berkaitan dengan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan.

Pengelolaan terhadap TMSBK belum optimal. Hal ini dapat dilihat dari dua faktor yaitu, faktor internal seperti terbatasnya sarana dan prasarana, masih rendahnya sumber daya manusia serta lahan yang semakin sempit akibat berkembangnya pemukiman penduduk di sekitar TMSBK dan faktor eksternal seperti kurangnya kepedulian masyarakat terhadap arti dan fungsi dari TMSBK serta masih sedikit pihak-pihak luar yang mau menjalin kerjasama dengan TMSBK.

Belum optimalnya pengelolaan TMSBK disebabkan juga oleh belum memadainya sumber daya manusia yang dimiliki seperti para ahli dan struktur lainnya. Adanya perbedaan antara jumlah satwa dan pegawai menyebabkan pengelola TMSBK belum bisa mengelola taman satwa ini secara optimal. Perbedaan jumlah ini dapat diatasi dengan menjadikan TMSBK sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau Unit Kerja pada SKPD

di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

Dalam Permendagri No. 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum daerah disebutkan bahwa BLUD memiliki Pola Pengelolaan Keuangan yang diterapkan pada SKPD atau unit kerja dengan diberikan fleksibilitas, yaitu berupa keleluasaan untuk menerapkan praktik-praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya. Dengan kata lain, pendapatan BLUD yang berasal dari jasa layanan dapat digunakan langsung untuk membiayai kegiatannya, sehingga tidak masuk kas daerah terlebih dahulu.

Jika sebuah lembaga ingin meningkatkan statusnya menjadi BLUD, lembaga tersebut harus menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD (PPK-BLUD). Namun untuk menerapkan PPK-BLUD terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh SKPD atau unit kerja, yaitu persyaratan substantif, persyaratan teknis dan persyaratan administratif.

Dalam hal ini Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Bidang TMSBK sudah berupaya memenuhi persyaratan untuk menerapkan PPK-BLUD, seperti pada tahun 2010 dan 2012 TMSBK diarahkan untuk menjadi BLUD dengan dibentuk tim

khusus dalam pengelolaannya. Namun hingga saat ini usaha yang telah dilakukan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Bidang TMSBK belum bisa meningkatkan status taman satwa tersebut menjadi BLUD.

Berdasarkan fenomena diatas maka peneliti tertarik untuk mengkaji bagaimana pengelolaan TMSBK Kota Bukittinggi dalam upaya menuju BLUD. Harapan peneliti nantinya hasil penelitian ini dapat menjadi acuan bagi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bukittinggi dalam mengoptimalkan pengelolaan TMSBK sehingga TMSBK dapat menjadi BLUD.

TINJUAN PUSTAKA

1.1 Pengelolaan

Pengelolaan merupakan suatu aktivitas yang sistematis yang saling bersusulan agar tercapai tujuan, **Siswanto (2005:21)**.

Pengelolaan umumnya dikaitkan dengan aktivitas perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, penempatan, pengarahan, komunikasi dan pengambilan keputusan yang dilakukan oleh setiap organisasi dengan tujuan untuk mengkoordinasikan berbagai sumber daya yang dimiliki oleh organisasi sehingga akan dihasilkan produk atau jasa secara efisien, **Sobri (2009:1-2)**.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan pengelolaan adalah suatu rangkaian kegiatan yang berintikan perencanaan, pengorganisasian, pergerakan dan pengawasan yang bertujuan menggali dan memanfaatkan sumber daya alam yang dimiliki secara efektif untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditentukan.

1.2 Manajemen

Manajemen berasal dari kata *to manage* yang berarti mengatur (mengelola), **Wilujeng (2007:2)**.

Manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan tertentu, Melayu S.P Hasibuan dalam **Marnis (2008:3)**.

Manajemen adalah suatu proses atau kerangka kerja yang melibatkan bimbingan dan pengarahan suatu kelompok orang-orang ke arah tujuan-tujuan operasional atau maksud-maksud yang nyata, **Brantas (2009:4)**.

Atmosudirjo (2004:56), menyatakan bahwa manajemen adalah menyelenggarakan sesuatu dengan menggerakkan orang-orang, uang, mesin-mesin dan alat-alat sesuai dengan kebutuhan.

Manajemen adalah ilmu dan seni untuk melakukan tindakan guna mencapai tujuan dengan mengakumulasi pengetahuan yang sistematis atau kesatuan pengetahuan yang terorganisir, **Siswanto (2006:7)**.

Manajemen merupakan fungsi untuk mencapai sesuatu melalui kegiatan orang lain dan mengawasi usaha-usaha individu untuk mencapai tujuan bersama, Haiman dalam **Manullang (2001:3)**.

Adapun menurut **Kasim (2005:5)**, pemanfaatan utama manajemen adalah untuk mengelola program kerja melalui proses perencanaan, pengawasan atau pelaksanaan, atau pelaksanaan ulang agar tujuan program tersebut dapat tercapai.

Terry (2006:4) berpendapat, *“management is a distinct process consisting of planning, organizing,*

actuating and controlling performed to determine and accomplish stated objectives by use of human being and other resources”, artinya manajemen adalah suatu proses yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lain.

Menurut James A. F. Stoner dalam **Handoko (2001:8)**, manajemen adalah perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya-sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

Manajemen merupakan aktivitas yang mencakup perencanaan adalah proses penentuan tujuan dan pedoman pelaksanaan dengan memilih yang terbaik dari alternatif-alternatif yang ada. Pengorganisasian adalah suatu proses penentuan pengelompokan dan pengaturan bermacam-macam aktivitas yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Pengarahan adalah mengarahkan semua bawahan agar mau bekerja sama dan bekerja efektif untuk mencapai tujuan. Pengendalian dan pengawasan adalah proses pengaturan berbagai faktor dalam suatu perusahaan agar sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam rencana, **Hasibuan (2004:41)**.

1.3 Pariwisata

Pariwisata adalah salah satu jenis industri baru yang mampu menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang cepat dalam menyediakan lapangan kerja, peningkatan penghasilan, standar hidup serta

menstimulasi sektor-sektor produktivitas lainnya, **Pendit (2006:4)**.

Pariwisata adalah kegiatan atau aktivitas yang dilaksanakan untuk sementara waktu dalam rangka menambah wawasan bidang sosial kemasyarakatan, sistem perilaku dari manusia itu sendiri dengan berbagai dorongan kepentingan sesuai dengan budaya yang berbeda-beda yang berhubungan dengan upaya kesenangan, termasuk pengusaha objek dan daya tarik wisata serta usaha lain yang terkait di bidang tersebut, **Wardiyanto (2011:46)**.

Menurut Mathiseon dan Wall dalam **Pitana (2005:3)** pariwisata mencakup 3 elemen:

1. *A dynamic element*, yaitu travel ke suatu destinasi wisata.
2. *A static element*, yaitu singgah di daerah tujuan.
3. *A consequential element*, yaitu akibat dari dua hal diatas (khususnya pada masyarakat lokal) yang meliputi dampak ekonomi, sosial dan fisik dari adanya kontak dengan wisatawan.

Tindakan pemerintah dalam bidang pariwisata menurut **Wahab (1975:183)** yaitu:

1. Promosi dan pengembangan pariwisata secara sistematis.
2. Mengawasi standar dan ualitas jasa-jasa wisata baik melalui organisasi pariwisata nasional maupun departemen-departemen yang lain.
3. Tanggung jawab menyeluruh mengenai pendidikan dan latihan dalam semua bidang industri pariwisata mungkin disisi lain menjadi perhatian pemerintah yang penting.

Menurut **Yoeti (2008:91)**, pada dasarnya kebijakan tersebut

lebih banyak diarahkan dan ditekankan dalam rangka untuk mengambil langkah-langkah penyelenggaraan beberapa kegiatan yang antara lain meliputi:

1. Meningkatkan pemahaman seluruh lapisan masyarakat tentang manfaat pariwisata dalam pembangunan.
2. Meningkatkan citra dan mutu pelayanan pariwisata nasional.
3. Meningkatkan penyelenggaraan promosi pariwisata Indonesia di luar negeri.
4. Memberi pengarahan dan petunjuk dalam pengembangan kepariwisataan dalam ruang lingkup nasional.
5. Mengadakan koordinasi dengan departemen terkait, lembaga-lembaga pemerintah, pemerintah daerah, pihak swasta nasional dan organisasi masyarakat untuk menyerasikan langkah dalam perencanaan dan pengembangan pariwisata di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Analisis data yang penulis gunakan adalah metode deskriptif kualitatif, dengan pengambilan data primer dan data skunder melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. data-data yang diperoleh akan di bahas secara menyeluruh dengan dibandingkan konsep teori-teori yang mendukung pembahasan terhadap permasalahan dalam penelitian ini.

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Pengelolaan Taman Margasatwa dan Budaya Kinantan (TMSBK) Kota Bukittinggi

Manajemen adalah suatu rangkaian pekerjaan atau usaha yang

dilakukan sekelompok orang untuk melakukan serangkaian kerja dalam mencapai tujuan tertentu. Untuk dapat melaksanakan pengelolaan TMSBK, dibutuhkan adanya pengelolaan. Pengelolaan TMSBK ini dibagi menjadi dua tahap, yaitu pengelolaan fisik dan non fisik. Pengelolaan fisik merupakan pengelolaan terhadap fisik bangunan TMSBK dan fasilitas pendukung lainnya. Sedangkan pengelolaan non fisik diantaranya:

1. Perencanaan (*planning*)

Perencanaan merupakan kegiatan untuk menetapkan tujuan yang akan dicapai beserta cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut. Upaya yang dilakukan dalam perencanaan adalah merencanakan program yang dapat memberikan pengembangan bagi TMSBK dan meningkatkan pengelolaan yang baik bagi TMSBK sehingga menarik minat wisatawan baik yang berskala nasional maupun internasional.

2. Pengorganisasian (*organizing*)

Pengorganisasian merupakan keseluruhan proses pengelompokkan orang-orang, alat-alat, tugas-tugas, wewenang dan tanggung jawab sedemikian rupa sehingga membentuk suatu wadah (organisasi) yang dapat digerakkan sebagai suatu kesatuan dalam rangka pencapaian tujuan. Pengorganisasian yang optimal merupakan suatu integritas dari hal-hal yang mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi mencapai tujuannya. Secara garis besar penempatan pegawai (*staffing*) dan koordinasi merupakan poin penting dalam pembentukan kinerja pegawai.

Dimulai dari penerimaan tenaga kerja berdasarkan kompetensi, sehingga pelaksanaan tugas dan hasil yang optimal dapat dicapai.

Penempatan pegawai (*staffing*) TMSBK yang tepat sesuai dengan bidangnya akan membuat proses pengelolaan berjalan dengan baik, dikarenakan pegawai yang ditempatkan memahami tugas yang akan dikerjakan.

Koordinasi berfungsi untuk menjamin kelancaran prosedur kerja dari beberapa satuan kerja yang merupakan komponen atau bagian dari organisasi secara keseluruhan, yang masing-masing menjalankan sebagian dari tugas dan fungsi sebagai akibat dari sosialisasi dan fungsionalisasi. Dengan koordinasi dimaksudkan agar tercapai kesatuan tindakan dalam usaha mencapai tujuan organisasi secara menyeluruh, mencegah adanya kesimpangsiuran atau pertentangan, kekembaran, tumpang tindih (*overlapping*), kesenjangan dalam pelaksanaan tugas pekerjaan serta meningkatkan efisiensi. Untuk pencapaian tujuan TMSBK yang maksimal rapat koordinasi perlu diadakan secara berkelanjutan karena didalam rapat tersebut ide-ide atau gagasan dapat tersampaikan.

3. Pengarahan (*actuating*)

Pengarahan merupakan suatu kegiatan memimpin, memilih dan memberikan arahan dan penilaian terhadap para pekerja sehingga mereka akan bekerja secara baik untuk mencapai rencana. Pengarahan dalam pengelolaan TMSBK meliputi pemberian arahan dari pimpinan kepada seluruh perangkat untuk mengatur segala kegiatan dan tugas yang berkaitan dengan pengelolaan TMSBK.

4. Pengawasan (*controlling*)

Pengawasan pada hakekatnya merupakan tindakan membandingkan antara hasil dalam kenyataan (*dassein*) dengan hasil yang

diinginkan (*das sollen*). Hal ini disebabkan karena antara kedua hal tersebut sering terjadi penyimpangan. Maka tugas pengawasan adalah melakukan koreksi atas penyimpangan-penyimpangan tersebut. Pengawasan dilakukan dengan tujuan untuk memperbaiki kesalahan yang terjadi pada pengelolaan TMSBK dan kemudian membuat perencanaan baru untuk pencapaian tujuan dan sasaran.

B. Faktor-faktor Penghambat Pengelolaan Taman Margasatwa dan Budaya Kinantan (TMSBK) dalam Upaya Menuju Badan Layanan Umum Daerah

1. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang sangat mempengaruhi pelaksanaan pengelolaan TMSBK, maksudnya dilihat dari tingkat kemampuan, pengetahuan dan keaslian yang dimiliki dalam melaksanakan pekerjaan ataupun kegiatan lainnya, baik secara prosedur, sistem, proses dan teknis dalam organisasi.

Dalam hal ini petugas dituntut untuk memiliki kemampuan, pengetahuan dan keahlian yang cukup untuk dapat melaksanakan pekerjaan, bukan hanya pengalaman sumber daya manusia yang diperlukan, namun kemampuan, pengetahuan dan keahlian yang dimiliki sumber daya manusia juga modal dalam membantu pelaksanaan tugasnya. Kualitas dan jumlah petugas pengelola adalah salah satu modal utama untuk melakukan pengelolaan, hal ini merupakan kunci keberhasilan yang mana kualitas dan jumlah petugas pengelolaan yaitu mampu melakukan pengelolaan dengan baik, tahu benar standar yang telah ditentukan dan tentunya orang-

orang yang kompeten dalam bidang pengelolaan.

2. Evaluasi

Evaluasi adalah penilaian yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan yang ditemukan. Evaluasi digunakan untuk membantu memilih dan merancang kegiatan yang akan datang. Evaluasi pada dasarnya merupakan kajian yang merupakan kegiatan mencari faktor-faktor penyebab timbulnya permasalahan, bukan hanya sekedar gejala yang tampak pada permukaan. Evaluasi pada TMSBK seharusnya dilakukan secara rutin sehingga kesalahan-kesalahan yang telah terjadi sebelumnya terulang kembali.

3. Izin Kepala Daerah

Izin dari Kepala Daerah sangat penting bagi suatu lembaga yang ingin meningkatkan statusnya menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dengan menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD (PPK-BLUD). Untuk mendapatkan izin tersebut suatu lembaga harus mengajukan surat permohonan untuk menerapkan PPK-BLUD sebagaimana yang tertulis pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pasal 18.

4. Karakter Pemanfaat (pengunjung)

Yang dimaksud dengan karakter pemanfaat adalah pengetahuan pengunjung dan keikutsertaan atau kepedulian pengunjung dalam pengelolaan TMSBK demi pelestarian taman satwa itu sendiri. Partisipasi pengunjung dapat berupa kesadaran pengunjung dalam menjaga dan melestarikan taman satwa serta pentingnya taman satwa.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian tersebut maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Upaya pengelolaan TMSBK oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bukittinggi masih belum optimal. Hal ini dilihat dari proses pengelolaan baik fisik maupun non fisik yang masih belum terlaksana. Untuk pengelolaan non fisik seperti penyusunan perencanaan program pengembangan TMSBK sudah cukup baik, namun dalam implementasinya terkendala dengan aturan-aturan yang ada. dalam penempatan pegawai, pengelola TMSBK belum menerapkan asas pengisian jabatan yaitu *The Right Man in The Right Place and The Right Man on The Right Job* (penempatan orang-orang yang tepat pada tempat yang tepat dan penempatan orang-orang yang tepat pada pekerjaan yang tepat). Untuk pengarahannya dalam pengelolaan TMSBK sudah berjalan sebagaimana mestinya, hanya saja terkendala dengan kemampuan pegawai dalam memahami arahan dari pimpinan. Sedangkan dalam pengawasan belum optimal. Hal ini dikarenakan pengawasan yang dilakukan hanya pada saat tertentu, tidak dilakukan secara rutin dan berkelanjutan.
2. Tidak memadainya jumlah pegawai menjadi salah satu faktor yang sangat mempengaruhi pelaksanaan pengelolaan TMSBK. Pengetahuan dan pemahaman tentang pengelolaan dan kesejahteraan satwa juga masih

kurang. Sedangkan kurangnya evaluasi dari pimpinan membuat pegawai belum merasa memiliki tanggung jawab terhadap tugas. Kurangnya evaluasi dari pimpinan membuat kesalahan yang telah terjadi sebelumnya kembali terulang. Selain itu Kepala Daerah juga belum memberikan izin untuk TMSBK meningkatkan statusnya menjadi BLUD, hal ini dikarenakan masih adanya masalah profesionalitas kerja dan TMSBK dirasa belum mampu untuk mandiri. Kurangnya kepedulian karakter pemanfaat (pengunjung) dalam memahami pentingnya menjaga dan melestarikan satwa juga memberikan dampak terhadap proses pengelolaan TMSBK.

DAFTAR PUSTAKA.

- Atmosudirjo, Prajudi. 2004. *Manajemen Sumber Daya Manusia dalam Perspektif Global*. Bandung: PT. Intan Perkasa
- Brantas. 2009. *Mengenal Manajemen Organisasi*. Jakarta: Yudistira
- Handoko, T. Hani. 2001. *Manajemen Personalia dan Sumber Daya manusia*, Edisi Kedua. Yogyakarta: BPFE
- Hasibuan, S.P Melayu. 2004. *Manajemen Dasar Pengertian dan Masalah*. Jakarta: PT. Bumi Aksara
- Kasim, Iskandar. 2005. *Dasar-dasar Manajemen*. Jakarta: PT. Gramedia
- Manullang. 2001. *Manajemen Personalia Edisi 3*. Yogyakarta: BPFE

- Marnis. 2008. *Pengantar Manajemen*. Pekanbaru: Unri Press
- Pendit, Nyoman. 2006. *Ilmu Pariwisata Sebuah Pengantar Perdana*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita
- Pitana, I Gede. 2005. *Sosiologi Pariwisata*. Denpasar: penerbit Andi
- Siswanto, H. B. 2005. *Manajemen Tenaga Kerja Indonesia Pendekatan Administratif dan Operasional*. Jakarta: Bumi Aksara
- _____. 2006. *Pengantar Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara
- Terry, George R. 2006. *Asas-asas Manajemen*. Bandung: PT. ALUMNI
- Wahab, Saleh. 1975. *Manajemen Kepariwisata*. Jakarta: Pradnya Paramita
- Wardiyanto. 2011. *Perencanaan dan Pengembangan*. Bandung: PT. Lubuk Agung
- Wilujeng, Sri. 2007. *Pengantar Manajemen*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Yoeti, Oka A. 2008. *Perencanaan dan Pengembangan Pariwisata*. Jakarta: Pradnya Paramita